
METODE KAJIAN

Kajian Evaluasi Dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Koperasi Dan UKM

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dan prosedur ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan informasi, dan pengambilan kesimpulan hasil penelitian serta menyusun rekomendasi untuk melakukan revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM di Indonesia.

Dalam Term of Reference(TOR/ KAK) ditetapkan tujuan dari pekerjaan Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM terdiri dari 4 butir, namun dalam pembahasan desain dengan Kementerian Koperasi dan UKM, tujuan kajian dimodifikasi dengan menambah 1 tujuan kajian, sesuai dengan kebutuhan Kementerian Koperasi dan UKM. Rumusan tujuan kajian menjadi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan Koperasi dan UKM dalam masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Koperasi dan UKM dalam masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu,

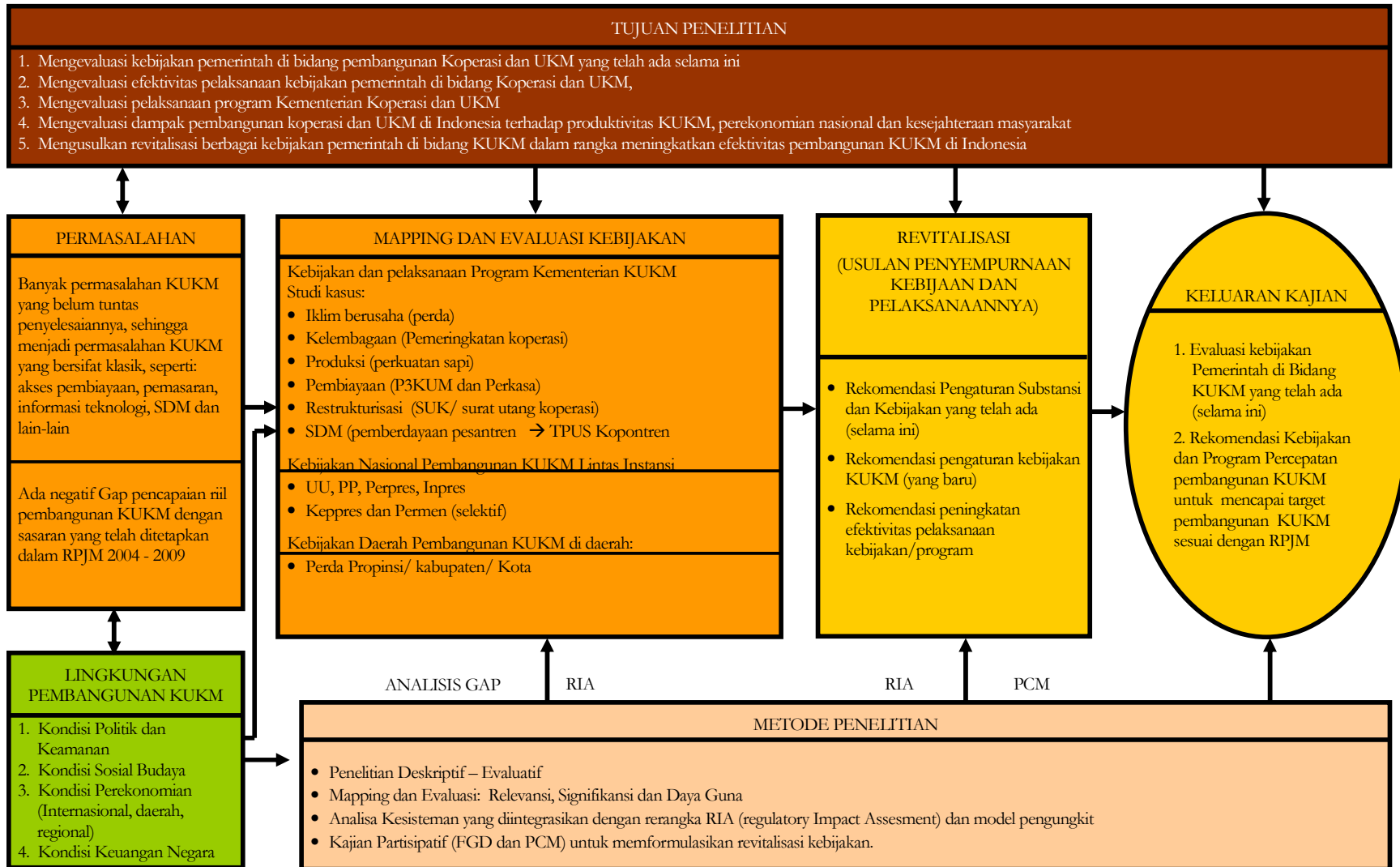


3. Mengevaluasi pelaksanaan program unggulan Kementerian Koperasi dan UKM
4. Mengevaluasi dampak pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia terhadap produktivitas KUKM, perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat
5. Mengusulkan revitalisasi berbagai kebijakan pemerintah di bidang KUKM dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan KUKM di Indonesia

Bagan 3.1 menunjukkan secara umum, alur pikir yang ditempuh untuk menyelesaikan kajian dan menjawab tujuan kajian tersebut diatas.

Dalam kajian ini, **tujuan kajian pertama** didekati dengan melakukan proses **inventarisasi** berbagai kebijakan pemerintah di bidang pembangunan KUKM dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan berbagai aturan pelaksanaannya, serta melakukan **pemetaan** (mapping) substansi berbagai kebijakan pembangunan KUKM tersebut. Untuk mencapai tujuan pertama ini, dilakukan *desk research* dan evaluasi relevansi dan tingkat kepentingan substansi pengaturan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan KUKM dengan kondisi pada saat ini. *Desk research* kemudian diintegrasikan dengan hasil observasi dan survei lapangan, serta pencocokan data ekonomi makro dan data perkembangan produktivitas KUKM untuk dapat dievaluasi pelaksanaan dan dampak kebijakannya bagi KUKM.

Bagan 3. 1. Alur Pikir Kajian



Mengingat kebijakan yang berpengaruh terhadap perkembangan KUKM memiliki spektrum yang luas, maka secara umum kebijakan yang dievaluasi dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (1) Relevansi, (2) Signifikansi, dan (3) Daya guna kebijakan terhadap pembangunan KUKM.

1. Relevansi kebijakan terhadap KUKM. Relevansi mengukur langsung tidaknya sebuah kebijakan mengatur KUKM. Relevansi ini kemudian diurutkan berdasarkan pertimbangan apakah

- kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan langsung mengatur usaha KUKM, seperti: Undang-undang tentang Usaha Kecil dan peraturan pelaksanaannya, serta berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM,
- kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur KUKM tetapi memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan usaha KUKM, seperti: pengaturan tata ruang dan wilayah, kebijakan perbankan, dan lain-lain, dan
- kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur KUKM, tetapi memiliki pengaruh yang besar secara tidak langsung terhadap perkembangan usaha KUKM, seperti: kebijakan perpajakan, kebijakan perizinan usaha, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
- kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur KUKM, dan seharusnya memang tidak diatur

2. Signifikansi kebijakan terhadap KUKM. Signifikansi mengukur pengaruh kebijakan pada KUKM, apakah kebijakan berpengaruh langsung atau tidak langsung.

3. Daya Guna Kebijakan terhadap KUKM. Daya guna mengukur daya ubah kebijakan terhadap area struktur pasar, perilaku pasar, kinerja UKM, atau hanya ketatalaksanaan (birokratis)

Tabel 3. 1. Kategori Kebijakan Pemerintah

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
Relevansi	R1	kebijakan mengatur langsung KUKM;
	R2	kebijakan tidak mengatur langsung KUKM;
	R3	kebijakan tidak mengatur KUKM, seharusnya diatur;
	R4	kebijakan tidak mengatur KUKM, dan seharusnya memang tidak diatur
Signifikansi	S1	kebijakan berpengaruh langsung pada KUKM;
	S2	kebijakan berpengaruh tidak langsung pada KUKM;
	S3	kebijakan tidak berpengaruh pada KUKM
Daya Guna	D1	kebijakan mengubah struktur pasar;
	D2	kebijakan mengubah perilaku pasar;
	D3	kebijakan mengubah kinerja UKM;
	D4	kebijakan mengubah birokratis;
	D5	kebijakan tidak berdaya guna

Contoh identifikasi dan pemetaan kebijakan ini dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini. Tampak bahwa Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang *Penanaman Modal* ini dinilai tidak mengatur langsung KUKM ($R_n=2$) karena substansi kebijakannya lebih banyak mengatur perusahaan besar dan asing yang ingin melakukan penanaman modal di Indonesia, namun UU dinilai akan berpengaruh langsung kepada KUKM ($S_n=1$) karena pengaturan daftar negatif investasi dan komoditi-komoditi yang penanaman modalnya harus dilaksanakan bekerjasama dengan usaha menengah dan kecil, sedangkan daya guna kebijakan dinilai akan mengubah struktur pasar ($D_n=1$), atau minimal mempertahankan struktur pasar KUKM.

Tabel 3. 2. Contoh Identifikasi dan Mapping Kebijakan

IDEN- TTAS	TAHUN	NO.	TENTANG	RELEVAN SI (RN)	SIGNIFIKA NSI (SN)	DAYA GUNA (DN)	BIDANG
UU	2007	UU 25/07	Penanaman Modal	2	1	1	Investasi

Tujuan kajian kedua didekati dengan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UKM, serta dampak pembangunan KUKM di Indonesia terhadap produktivitas UKM, perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan RIA (*regulatory impact analysis*). Untuk itu, dilakukan survei persepsi kepada pemangku kepentingan (aparatur pemerintah yang membidangi KUKM – lintas instansi, seperti: Kementerian Koperasi dan UKM,



Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kelautan, Departemen Pertanian, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Dinas-dinas terkait di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota, dan instansi pemerintah lainnya; pelaku usaha dan asosiasi, seperti: Kadin, Asosiasi, Dekopin, dan lain-lain; pelaku KUKM; masyarakat, seperti: media masa, perguruan tinggi, pakar, dan unsur masyarakat lainnya). Survei persepsi ini dilakukan untuk mengkaji berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan KUKM serta upaya perbaikannya. Untuk itu, kajian melakukan observasi dan survei lapangan mengenai pelaksanaan pembangunan KUKM, serta analisis data ekonomi makro dan data perkembangan kinerja KUKM untuk mengevaluasi berbagai Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM di Indonesia dengan pendekatan *regulatory impact analysis* (RIA).

Tujuan kajian yang ke tiga diwujudkan dengan mengintegrasikan hasil kajian (pada tujuan pertama dan kedua) dengan usulan/masukan dari pemangku kepentingan untuk memperbaiki substansi pengaturan kebijakan pemerintah, serta dibandingkan dengan *benchmarking* dari berbagai praktik terbaik secara internasional atau praktik terbaik di suatu daerah berdasarkan hasil observasi dan survei lapangan. Dalam mengusulkan revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM dikaji dalam kerangka *regulatory impact analysis* (RIA) agar hasil revitalisasi kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan KUKM daripada biayanya, serta menggunakan kerangka analisis PCM untuk menentukan akar masalah dari pengaturan yang harus direvitalisasi.

Tujuan kajian ke empat didekati dengan kajian data statistik dari beragam sumber menggunakan analisis deskriptif dan inferensial yang diperlukan agar dapat melihat dampak pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia terhadap produktivitas KUKM, perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kajian ke lima didekati dengan melakukan analisis *gap* antara target sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM dengan kondisi riil yang dicapai sampai saat ini. Analisis *gap* akan memberikan indikasi seberapa besar upaya untuk mencapai target RPJM pada akhir tahun 2009, sehingga dapat di inventarisasi berbagai kebijakan strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai target RPJM. Inventarisasi kebijakan



ini diharapkan melibatkan para pemangku kepentingan yang bersifat lintas instansi, sehingga rumusan kebijakan yang dihasilkan telah memperoleh komitmen awal dari pemangku kepentingan dengan harapan akan lebih memudahkan koordinasi dalam implementasinya. Tahapan ini juga merupakan tahapan evaluasi, apakah masih realistis target yang ditetapkan RPJM untuk dapat dicapai sampai dengan tahun 2009 dengan potensi sumberdaya dan waktu yang tersedia, atau diperlukan revisi target, atau cukup revisi kebijakan dan realokasi sumberdaya. Perumusan kebijakan strategis akan menggunakan pendekatan model pengungkit yang diintegrasikan dengan PCM dan RIA untuk memperoleh rumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan percepatan pembangunan UKM di Indonesia pada masa mendatang.

3.1. Jenis Metodologi Kajian

Secara umum penelitian ini dapat digolongkan sebagai kegiatan penelitian **deskriptif** dengan konsentrasi pada evaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM, dan mengkaji kebutuhan revitalisasi kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan KUKM di Indonesia pada masa mendatang. Meskipun secara umum kajian ini bersifat deskriptif, namun akan banyak dikaji hubungan sebab-akibat satu variabel dengan variabel lainnya dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembangunan KUKM dan merumuskan kebijakan pemerintah di bidang KUKM yang komprehensif dan efektif di Indonesia.

Disamping itu, merujuk pada pendekatan pencapaian tujuan yang akan dilakukan, maka kajian ini dapat pula dikelompokkan sebagai *participatory action research* mengingat pendekatan yang dilakukan juga diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan KUKM dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang KUKM.



3.2. Lokasi Kajian

Daerah penelitian ditetapkan pada 6 provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Responden dari keenam provinsi dinilai dapat mewakili pemangku kepentingan di daerah. Untuk mewakili responden pada skala nasional, daerah penelitian di Jakarta dengan responden yang dinilai dapat merepresentasikan kepentingan KUMKM pada skala nasional, seperti: Kadin, Dekopin, Asosiasi, dan aparaturnya pada Departemen/ Kementerian terkait.

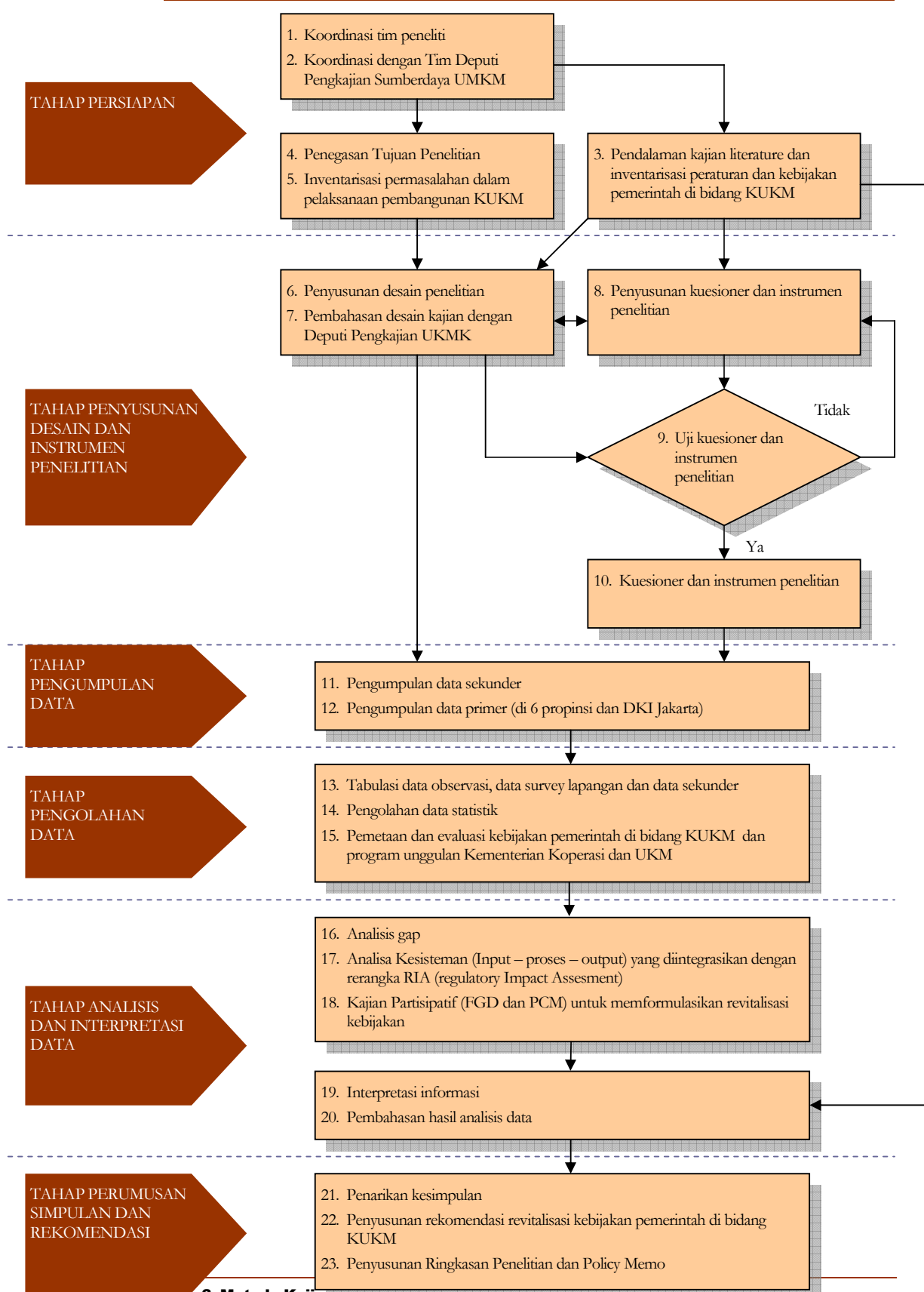
3.3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam langkah-langkah sebagai berikut, keterkaitan satu tahapan penelitian dengan tahapan lainnya dapat diikuti pada bagan 3.2.

1. Tahap persiapan mencakup rangkaian kegiatan antara lain: melakukan koordinasi tim peneliti, melakukan koordinasi dengan Tim Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, melakukan pendalaman kajian literatur sebagai landasan teoritis dan akademis pelaksanaan penelitian, perumusan dan mempertegas tujuan penelitian, serta inventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan KUKM di Indonesia.
2. Tahap penyusunan desain penelitian dan penyusunan instrumen penelitian dan melakukan pembahasan desain kajian dengan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.
3. Tahap pengumpulan data, baik data primer dan data sekunder. Pengumpulan data akan dilakukan di 6 provinsi, yaitu: Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Propinsi kajian diharapkan dapat merepresentasikan kegiatan pembangunan KUKM di wilayah Indonesia (barat, tengah dan timur).



Bagan 3. 2. Tahapan Penelitian





4. Tahap pengolahan data, yang mencakup kegiatan tabulasi dan pengolahan data observasi dan survei lapangan, data survei persepsi stakeholders, data hasil diskusi kelompok, informasi hasil diskusi publik, serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi. Dalam tahap ini juga dilakukan pemetaan dan evaluasi terhadap masing-masing kebijakan dan program unggulan yang ada.
5. Tahap analisis dan interpretasi data. Hasil pengolahan data dianalisis dengan menggunakan analisis gap, kerangka analisis kesisteman dalam kerangka model teori pengungkit, analisis RIA, analisis PCM, dan analisis kualitatif dan kuantitatif lainnya, serta melakukan interpretasi dan pembahasan hasil analisis data.
6. Tahap perumusan simpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasinya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dapat ditarik simpulan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tujuan penelitian, serta menyusun rekomendasi untuk revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM di Indonesia pada masa mendatang.

3.4. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian mengumpulkan berbagai data dan informasi di 6 provinsi, baik data primer yang dikumpulkan langsung oleh tim peneliti maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi lain atau hasil publikasi.

Data yang dikumpulkan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan KUKM di Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan KUKM, baik pada tingkat pusat dan daerah. Data ini dapat



diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas yang membidangi KUKM dan instansi lain.

2. Peraturan perundang-undangan lainnya dan aturan pelaksanaannya yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan pembangunan KUKM, baik pada tingkat pusat dan daerah. Peraturan lainnya dapat bersifat mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM, menghambat atau sifatnya kontra produktif terhadap pelaksanaan pembangunan KUKM, maupun sifatnya netral. Data ini dapat diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan di pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota), penelusuran literatur dan browsing di internet.
3. Data kebijakan/program pemberdayaan KUKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang terdiri dari: input, proses, dan output program yang dicanangkan.
4. Data perekonomian nasional, data kinerja dan produktivitas UKM secara nasional, dan data ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat lainnya secara nasional. Data ini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, dan instansi lainnya.
5. Data persepsi dari responden penelitian, yang mencakup persepsi mengenai permasalahan pembangunan KUKM, kebutuhan pembangunan KUKM di daerah, kebutuhan untuk penyempurnaannya, serta persepsi mengenai berbagai usulan perbaikannya. Data ini dapat dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok terarah.
6. Data penilaian efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM dan dampaknya (sebagai masukan analisis RIA), pemetaan akar masalah dan hubungan sebab akibat antar faktor (PCM) menurut penilaian peserta diskusi kelompok terarah. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara dan diskusi kelompok terarah di daerah.



7. Data kondisi perekonomian daerah, dikumpulkan dari publikasi BPS di daerah, browsing internet, dan data sekunder lainnya dari berbagai instansi pemerintah, dan perguruan tinggi (hasil kajian sebelumnya).
8. Data usulan perbaikan dan penyempurnaan Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM, disertai skala prioritasnya (AHP). Data ini dapat dijadikan kerangka untuk menyusun kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan KUKM di Indonesia. Data dapat dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan diskusi publik dengan instansi terkait.
9. Data praktik terbaik pelaksanaan perumusan Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM secara internasional dan berbagai hasil kajian sebelumnya, yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk melakukan revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM. Data diperoleh melalui kegiatan penelusuran literatur di Jurnal ilmiah, browsing internet, publikasi dari berbagai lembaga internasional, review hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain.
10. Data lain yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, baik data primer dan data sekunder.

3.5. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjamin data yang dikumpulkan mudah ditabulasi, diolah dan dianalisis, maka instrumen-instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data untuk kegiatan penelitian ini terdiri dari:

1. Kuesioner persepsi responden mengenai efektifitas pelaksanaan pembangunan KUKM (permasalahan, kebutuhan KUKM dan usulan penyempurnaannya)



2. Kuesioner persepsi responden mengenai efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM, dan dampaknya terhadap produktivitas KUKM, perekonomian daerah/ nasional dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kuesioner Identifikasi Permasalahan dan Penentuan Tingkat Kepentingan Faktor Yang Berpengaruh terhadap Efektifitas Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM (model AHP).
4. Daftar isian inventarisasi masalah dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM – lintas instansi.
5. Panduan diskusi kelompok terarah di daerah, berdasarkan pendekatan analisis kesisteman dalam kerangka model pengungkit, RIA dan PCM.
6. Panduan observasi dan survei lapangan, serta wawancara ke pemangku kepentingan di pusat dan daerah
7. Panduan diskusi publik untuk merumuskan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM.
8. Panduan data sekunder yang harus dikumpulkan dalam setiap survei lapangan ke daerah.

3.6. Sampel Penelitian

Responden penelitian terdiri dari: (1) pejabat dan staf instansi pemerintah yang membidangi KUKM seperti: Kementerian Koperasi dan UKM, dan instansi di pusat lainnya; (2) pejabat dan staf instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi KUKM; (3) pengurus koperasi yang terlibat dalam program pemerintah pembangunan KUKM; (4) pengusaha skala mikro, kecil dan menengah dari berbagai sektor usaha, (4) pengamat KUKM, pakar dari perguruan tinggi, penyedia BDS, dan bank pelaksana; dan (5) wakil masyarakat yang mencakup: penggiat LSM, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

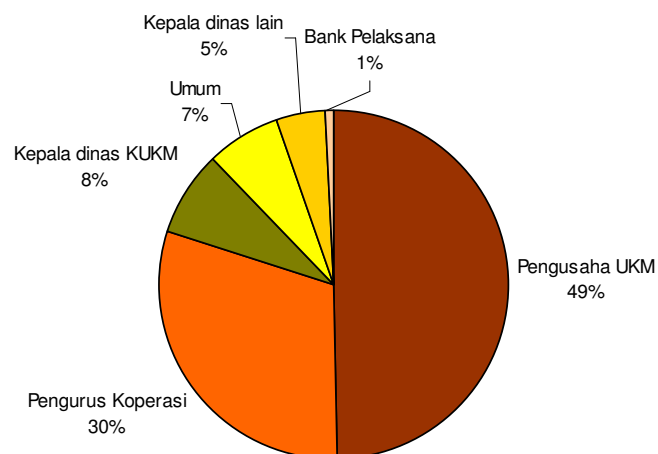
Responden daerah dipilih secara **purposive sampling**, dengan kriteria sebagai berikut:

- Mewakili pemangku kepentingan di atas,
- Berdomisili di daerah penelitian, dan
- Bersedia menjadi mitra penelitian.

Komponen terbesar dari sampel penelitian adalah pengusaha UKM (sekitar 49%), kemudian pengurus Koperasi yang mengelola perkuatan/program yang dilaksanakan (sekitar 30%), Kepala Dinas Koperasi dan UKM di daerah (sekitar 8%), kemudian sisanya adalah Dinas Lain dari Instansi Terkait dan Umum (sekitar 13%)

Sampel kajian ini dapat dipandang dari dua jenis. Pertama adalah sampel yang masuk dalam bentuk kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah. Jumlah kuesioner yang diterima, berisi dan dapat diolah adalah sebesar 371 unit kuesioner. Sampel lainnya adalah pihak-pihak yang ditemui, diwawancarai dan peserta dari diskusi yang dilakukan. Jika sampel jenis kedua ini juga dimasukkan, maka jumlah sampel kajian kurang lebih sebesar 600 unit sampel.

Gambar 3. 1. Sampel Penelitian





3.7. Metode Analisis

Data yang terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, dan selanjutnya dilakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan. Data hasil tabulasi dilakukan pengecekan ulang dengan data yang berkaitan untuk memastikan keakuratan dan kelogisan penyajiannya.

Data selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang, disajikan berdasarkan kesamaan karakteristik atau dibandingkan untuk memahami fenomena yang kontras, atau diolah agar mudah digunakan untuk pengolahan analisis statistik deskriptif maupun statistik inferen. Untuk data AHP akan dihitung rerata geometriknya untuk mengurangi bias dari jawaban yang ekstrim. Data diolah dalam bentuk spreadsheet agar mudah dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan berbagai program aplikasi statistik lainnya.

Ada beberapa analisis yang digunakan dalam kajian ini, yaitu:

1. **Analisis kesisteman.** Sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat komprehensif untuk memotret dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan KUKM, dan merekomendasikan penyempurnaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM, maka kajian ini akan menggunakan kerangka analisis kesisteman untuk menstrukturkan pendekatan utamanya. Pendekatan analisis kesisteman akan mengarahkan perhatian yang menyeluruh pada sisi input (masukan), proses dan output (keluaran) dari pelaksanaan peraturan yang diamati. Kerangka kesisteman dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor input, proses dan output secara menyeluruh dan lengkap.

Aspek **input** yang dikaji dan dievaluasi dapat meliputi: (1) kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan KUKM; (2) kelembagaan yang membidangi pembangunan KUKM dan kewenangannya; (3) sumberdaya pembangunan KUKM yang tersedia: jumlah anggaran, ketersediaan fasilitas dan sarana penunjangnya, sistem



birokrasi dan ketatalaksanaan pembangunan KUKM; (4) kesadaran dan kepedulian dunia usaha; (5) kesadaran masyarakat; dan (6) berbagai faktor input kebijakan pemerintah di bidang KUKM lainnya.

Aspek **process** yang dikaji dan dievaluasi antara lain mencakup: (1) sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan KUKM; (2) proses pembinaan kepada KUKM dan dunia usaha; (3) proses implementasi pelaksanaan pembangunan KUKM dalam rangka menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif dan pemberian dukungan perkuatan kepada KUKM; (4) proses sosialisasi dan pemasyarakatan pelaksanaan pembangunan KUKM; (5) proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang membidangi pembangunan KUKM; (6) proses koordinasi dan harmonisasi tugas antar lembaga yang membidangi pembangunan KUKM; (7) proses peningkatan kompetensi SDM; (8) proses pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pembangunan KUKM; (9) proses menjaga konsistensi dan kesinambungan kebijakan serta implementasinya, dan aspek proses pembangunan KUKM lainnya.

Aspek **output** yang akan dikaji dan dievaluasi antara lain mencakup aspek: (1) hasil kinerja pembangunan KUKM di Indonesia berdasarkan data sekunder dan data survey lapangan; (2) kesesuaian target pembangunan KUKM yang ditetapkan dalam RPJM dengan kondisi riil di lapangan; (3) dampak pembangunan KUKM terhadap produktivitas KUKM, perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dan aspek output lainnya.

- 2. Analisis RIA.** Pendekatan kesisteman juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan regulatory impact analysis (RIA) untuk mengevaluasi permasalahan dan mengevaluasi alternatif kebijakan untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM yang tepat diterapkan pada masa mendatang. RIA merupakan pendekatan yang membandingkan biaya dan manfaat yang timbul dari suatu kebijakan secara terintegrasi dan menyeluruh, dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan melalui diskusi publik. Untuk itu, RIA relatif tepat



digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan politik, perumusan kebijakan dan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

3. Analisis evaluasi efektifitas pelaksanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM akan menggunakan **model pengungkit dan metode kualitatif subyektif**. Salah satunya melalui diskusi dengan pakar dan responden kajian melalui kuesioner dan diskusi kelompok terarah.
4. **Analisis persepsi responden** digunakan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUKM di daerahnya, mengidentifikasi berbagai permasalahan, kebutuhan untuk penyempurnaannya, dan usulan alternatif solusinya.
5. **Analisis gap** digunakan untuk mengevaluasi kondisi riil pembangunan KUKM pada saat ini dengan target yang ditetapkan dalam RPJM, serta mengidentifikasi berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target RPJM pada tahun 2009. Analisis gap juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya, atau menganalisis antara harapan dengan kenyataan yang dihadapi oleh KUKM.
6. **Analisis harmonisasi peraturan dan kebijakan** digunakan untuk mengevaluasi keselarasan peraturan hukum yang ada dengan peraturan perundang-undangan di bidang KUKM, untuk menentukan dampak positif atau dampak negatif atau netral dari diberlakukannya suatu ketentuan hukum dengan upaya pemberdayaan KUKM yang efektif di Indonesia. Dalam kajian, analisis dilaksanakan dengan mengkategorikan relevansi, signifikansi dan daya guna sebuah peraturan/kebijakan terhadap perkembangan KUKM.
7. **Analisis benchmarking** digunakan dalam rangka menyempurnakan atau melakukan revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM di



Indonesia berdasarkan praktik terbaik pembangunan KUKM di berbagai negara lain, termasuk pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangannya, penataan kelembagaan dan pengembangan sistem tata laksananya.

- 8. Analisis PCM.** Dalam rangka mengidentifikasi akar masalah dari pelaksanaan pembangunan KUKM berdasarkan penilaian dari pemangku kepentingan akan digunakan pendekatan project cycle management di beberapa daerah kajian, yang pada akhirnya dapat disusun peta hubungan sebab-akibat antar variabel yang berpengaruh dalam pembangunan KUKM di Indonesia. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan KUKM di Indonesia, perumusan alternatif kebijakan strategis dan penentuan indikator kinerja perbaikan kebijakan pemerintah di bidang KUKM di Indonesia pada masa mendatang.

Berbagai pendekatan analisis di atas yang didukung data dan informasi survei lapangan, survei persepsi pemangku kepentingan, hasil diskusi kelompok terarah (FGD) dan diskusi publik, serta data sekunder lainnya yang memadai, diharapkan akan menghasilkan kajian yang berkualitas, komprehensif dan lebih mudah diimplementasikan, karena telah memperoleh komitmen awal dari pemangku kepentingan yang bersifat lintas instansi.

Interpretasi hasil analisis data, dan selanjutnya dibahas dalam bentuk diskusi dengan pakar dan pemangku kepentingan lainnya akan menghasilkan simpulan kajian yang obyektif, akurat dan dapat menggambarkan fenomena yang dikaji secara tepat. Secara umum perumusan simpulan hasil penelitian akan menggunakan pendekatan induktif untuk hal-hal yang relatif fenomenanya homogen di sebagian besar daerah penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Namun, untuk hal-hal yang tidak homogen antar daerah akan disimpulkan sebagai simpulan fenomena di daerah tertentu secara spesifik.

Hasil penelitian, yang dilengkapi dengan hasil *benchmarking* dari praktik terbaik pembangunan KUKM secara internasional atau praktik terbaik untuk suatu hal



tertentu di suatu daerah akan dijadikan acuan untuk menyusun rekomendasi merevitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM di Indonesia pada masa mendatang. Rekomendasi diharapkan bersifat komprehensif, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya, pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan desain program perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM, serta usulan program percepatan pemberdayaan KUMKM untuk mencapai target RPJM Nasional 2004 – 2009.